

**IMPLEMENTASI INPRES NO 3 TAHUN 2003
TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN *E-GOVERNMENT*
DI KABUPATEN MAJALENGKA**

ABSTRAKSI

Keyword : *e-Government*, Komitmen Pelaksana, Sosialisasi

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan proses pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka melalui sudut pandang Inpres No 3 tahun 2003.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dipresentasikan oleh Kantor Informasi dan Telematika dalam mengembangkan *e-Government*. Proses kebijakan yang dianalisis adalah selama Kantor Informasi dan Telematika eksis atau sebelum dilebur dengan Dinas perhubungan menjadi bidang Informasi dan Telematika dan dipilih 2 Informan yang berasal dari kantor informasi dan telematika untuk menggambarkan proses kebijakan pengembangan *e-Government*. Hasil dari kebijakan *e-Government* tentu harus berujung pada masyarakat sebagai penerima pelayanan sehingga untuk memperoleh gambaran ketepatan kebijakan *e-Government* dipilih tiga informan dari pihak masyarakat sebagai *cross check* yang menjadi indikator ketercapaian Implementasi Inpres no 3 tahun 2003.

Hasil penelitian Menunjukkan, bahwa ada perbedaan fakta antara hasil pengembangan *e-Government* yang dilakukan pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Implementasi yang diharapkan Inpres No 3 tahun 2003. Hal sangat terkait dengan Sikap/Komitmen pemerintah Kabupaten Majalengka sebagai Implementor/Pelaksana yang kurang memperhatikan Inpres no 3 tahun 2003 sehingga kecenderungan sikap/Komitmen pelaksana terfokus pada rancang bangun lokal pengembangan *e-Government*. Disamping itu keberadaan *e-Government* di Kabupaten Majalengka tidak banyak diketahui Masyarakat Majalengka, hal ini didasarkan pada argument informan dari pihak masyarakat yang menjustifikasi fenomena sosialisasi yang dianggap masih kurang diperhatikan oleh Implementor.

Disetujui oleh Pembimbing 1
Tanggal

(Dra. Nina Widowati, M.Si)
NIP. 131 610 347

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2003, Presiden Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Kemunculan Inpres ini tidak saja diartikan sebagai tindak lanjut Inpres no 6 tahun 2001 tetapi juga merupakan cetusan komitmen untuk menerapkan sebuah konsep tentang pemanfaatan teknologi informasi yang telah dipraktekan di negara-negara maju yang telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, yang diistilahkan sebagai *Electronic Government (e-Government)*.

Secara tegas, Inpres no 3 tahun 2003 merumuskan bahwa tujuan pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Maka untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan *e-Government* diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu :

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat serta tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan Negara
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah daerah otonom.

Pengembangan *e-Government* di daerah mulai menunjukkan hasil, selama rentang waktu 4 tahun sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden no 3 tahun 2003 banyak bermunculan *Web Site* pemerintah daerah yang biasanya dicirikan dengan akhiran *go.id*. Dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia 55,2 % telah memiliki situs resmi yang bisa diakses melalui internet, 33,4 % belum memiliki situs dan 11,4 % situsnya tidak dapat dibuka (Adrianto, 2004).

Dalam perkembangannya, sebagian besar pengembangan *e-Government* yang ada pada saat ini masih berfokus pada penyediaan *web site* dan layanan informasi saja, sehingga mendorong munculnya anggapan bahwa suatu instansi pemerintah sudah menerapkan *e-Government* ketika sudah memiliki *web site*. Padahal *e-Government* tidak hanya menampilkan informasi pemerintahan melalui *web site* semata, namun lebih dari itu, yakni adanya transformasi hubungan antara pemerintah dengan seluruh stakeholder yang semula menggunakan media konvensional digantikan dengan media elektronik (internet).

Ekses dari pemahaman *e-Government* yang dimaknai secara sempit menyebabkan berkurangnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. Menurut pengamatan peneliti saat pra-survey setidaknya anggapan tersebut berkembang di Kabupaten Majalengka yang merupakan salah satu daerah yang terikat Instruksi presiden no 3 Tahun 2003. Sebagaimana situs pemerintah pada umumnya yang memberikan layanan informasi, materi informasi dalam *web site* pemerintah majalengka masih terbatas pada penjelasan informasi yang sifatnya internal seperti : berita seputar Kabupaten Majalengka, gambaran potensi Kabupaten Majalengka sebagai daerah agrobisnis, Artikel-artikel dan beberapa dokumen digital yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan berbagai peraturan yang ada di Kabupaten Majalengka. Oleh karena itu kemunculan situs resmi yang bisa diakses melalui internet selama 24 jam dengan alamat <http://MajalengkaKab.go.id> dapat dikatakan masih sebatas pada motivasi pengadaan *web site* semata.

Sehebat apapun dan secanggih apapun teknologi yang digunakan dalam implementasi *e-Government* hal tersebut kembali kepada instansi pemerintah selaku pengembang *e-Government*. Budi Raharjo dalam artikelnya yang berjudul membangun *e-Government* menjelaskan bahwa “salah satu hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan *e-Government* di Indonesia adalah masalah kultur organisasi yakni budaya berbagi (*sharring*) dan budaya mendokumentasikan yang belum lazim dilakukan para birokrat”. Permasalahan ini diakui oleh bapak Helmi selaku staf telematika Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten Majalengka yang menjelaskan bahwa berbagai sistem Informasi manajemen yang ada di berbagai Instansi di majalengka sangat sulit

diintegrasikan ke dalam suatu wadah bersama sehingga mereka berjalan sendiri-sendiri, hal ini disebabkan kurangnya motivasi (*Support*) diantara para birokrat.

Lebih jauh lagi Helmi menjelaskan bahwa berbagai layanan informasi yang ada dalam *e-Government* Kabupaten Majalengka tidak didukung dengan data-data yang aktual sehingga layanan menjadi kurang bermakna. Helmi mencontohkan Layanan Sistem Potensi Agrobisnis masih menggunakan data-data yang lama yakni tahun 2005. Ironis, padahal sesuai dengan misi pembangunan daerah yang berambisi menjadikan daerah Kabupaten Majalengka sebagai Kabupaten termaju dalam bidang agrobisnis di Provinsi Jawa Barat tidak didukung dengan sistem layanan informasi yang memberikan informasi yang berkualitas. Tata sutabri, (2004:30) menjelaskan bahwa kualitas informasi itu sendiri dipengaruhi salah satunya faktor ketepatan waktu (*Timelines*), informasi yang sampai pada pengguna informasi tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai (*Value*) lagi. Terlebih bagi masyarakat yang membutuhkan informasi sebagai landasan di dalam pengambilan keputusan.

B. Permasalahan

Permasalahan penelitian terfokus pada :

1. Bagaimanakah Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka.

D. Kerangka Teori

Penelitian ini mendasarkan pada tiga konsep, teori sekaligus keterkaitan diantara masing-masing konsep yang menjadi landasan berpikir dalam penelitian ini.

1. Administrasi Negara dan Kebijakan Publik

Hakikat administrasi negara tidak bisa dilepaskan dari konsep administrasi itu sendiri. Ada beragam Definisi administrasi diantaranya yang dikemukakan oleh the Liang gie bahwa administrasi merupakan segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka administrasi negara dapat dicerna sebagai bagian dari administrasi yang memusatkan perhatiannya pada bidang-bidang yang bersifat publik.(mufiz, A.19:6).

Penerapan teknologi informasi dalam proses pemerintahan merupakan sebuah pilihan-pilihan pemerintah dalam menghadapi perubahan dan perkembangan lingkungan yang dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi. Masyarakat, swasta dan pemerintah mengharapkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) dalam proses

pemerintahan di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya pemerintah merealisasikan pilihan kebijakan ini dengan keluarnya Inpres no 3 tahun 2003 tentang strategi pengembangan *e-Government* yang mengikat pejabat-pejabat/administrator-administrator publik untuk secara komprehensif mengembangkan *e-Government* dengan berlandaskan pada kerangka Strategi Pengembangan *e-Government* Nasional.

Nugroho dalam bukunya kebijakan publik : Formulasi, Implementasi dan evaluasi menyatakan bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan
2. Implementasi Kebijakan
3. Evaluasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, hanya akan difokuskan pada satu tahap kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yakni Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya” (Riant Nugroho, 2003). Sedangkan Menurut Cahrles O.Jones (Dalam Islamy, 1988) Implementasi kebijakan adalah ”proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya”.

Van Meter & Van Horn (1975) (dalam Riant Nugroho, 2003) membuat gambaran mengenai hubungan faktor-faktor yang menentukan pencapaian

kebijakan/kinerja kebijakan. dapat dijelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1. Variabel standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya, mencakup dana, insentif atau perangsang lain
3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas organisasi
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang mempunyai efek mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksana.
6. Kecenderungan sikap pelaksana.

Sedangkan menurut Daniel A.Mazmanian & Paul A. sabatier (1983) (dalam Subarsono, 2005:94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni :

- A. Karakteristik Masalah
- B. Karakteristik Kebijakan
- C. Lingkungan Kebijakan

Model yang dipakai sebagai acuan dalam mendeskripsikan implementasi *e-Government* di Kabupaten Majalengka yaitu model Van Meter & Van Horn dan model Daniel A.Mazmanian & Paul A.Sabatier. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di muka, kedua model tersebut pada dasarnya memiliki persamaan dalam menggunakan sudut pandang proses implementasi. Kedua model memiliki dua kesamaan, yang pertama menjelaskan akan pentingnya aktor implemementasi yaitu badan-badan atau lembaga yang bertugas secara langsung melaksanakan implementasi. Persamaan kedua menjelaskan akan pentingnya pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan implementasi.

E. Fenomena yang diteliti.

1. Indikator Karakteristik Kebijakan, Adapun fenomena yang diteliti sebagai berikut :
 - a. Kejelasan isi kebijakan Inpres no 3 tahun 2003. Dalam Unsur ini akan diarahkan untuk mencari gambaran dan penilaian akan tingkat pemahaman implementor terhadap Inpres no 3 tahun 2003
 - b. Seberapa jauh kebijakan Implementasi *e-Government* tersebut memiliki dukungan teoritis. Fenomena ini sangat terkait dengan tingkat kemampuan agen pelaksana.
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Fenomena ini akan difokuskan untuk melihat bagaimana manajemen alokasi finansial dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka.
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana atau dalam model implementasi Van Meter & Van Horn unsur ini disebut komunikasi antar organisasi yang ada di lingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Majalengka.
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Hal ini akan mempengaruhi karakter agen pelaksana.
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan atau Disposisi Implementor dalam konsep Van Meter & Van Horn ini mencakup tiga hal penting yakni :

- a. Respon Implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan
 - c. Intensitas disposisi Implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
 - e. Seberapa luas akses yang diberikan Implementor kepada kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan Inpres no 3 tahun 2003.
2. Indikator Lingkungan Kebijakan, Adapun fenomena yang diteliti sebagai berikut :
1. Kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat penguasaan teknologi masyarakat yang berkepentingan yang ada di Kabupaten Majalengka. Hal ini memiliki berpengaruh terhadap kualitas nilai(*Value*) Implementasi *e-Government*.
 2. Dukungan publik/Masyarakat yang berkepentingan di Kabupaten Majalengka terhadap Implementasi *e-Government*. Unsur ini sangat penting karena sangat terkait dengan unsur kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada di Kabupaten Majalengka termasuk didalamnya sikap dari kelompok pemilih (*Constituency group*) .
 3. Indikator Implementasi *e-Government* di Kabupaten Majalengka berdasarkan Inpres no 3 tahun 2003, Adapun fenomena yang diteliti sebagai berikut :
1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas

pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga daerah serta penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan daerah.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlanjar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

F. Metodologi Penelitian

Bogdan dan Taylor (1975) (dalam Deddy Mulyana, 2003:145), “Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban”.

1. **Metode Penelitian** : Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa metode penelitian kualitatif bertujuan bukan untuk memahami realita tunggal, tetapi realita majemuk sehingga diharapkan mampu menjelaskan dan mencakup satuan-satuan gejala yang terlibat dalam proses pengembangan *e-Government* secara holistik di Kabupaten Majalengka.
2. **Pendekatan dan Tipe Penelitian** : Pendekatan yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, hal ini didasarkan

atas pertimbangan pendekatan fenomenologis dirasakan merupakan pendekatan yang dapat menjelaskan dinamika pengertian fenomena pembangunan *e-Government* di Kabupaten Majalengka seutuhnya.

3. Lokasi penelitian : Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majalengka.

4. Fokus penelitian : Penelitian ini akan terfokus pada tiga indikator penelitian yaitu indikator Karakteristik Kebijakan yang ada dan Indikator Lingkungan Kebijakan yang bersinggungan beserta Indikator Tujuan Implementasi kebijakan Inpres no 3 tahun 2003.

5. Pemilihan Informan :

Dalam ranah Karakteristik Kebijakan, dipilih informan sebagai berikut :

- Pembuat kebijakan : Kepala Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten Majalengka sebagai informan.
- Pelaksana : Staf Telematika Kantor Informasi dan telematika Kabupaten Majalengka sebagai Informan.

Dalam ranah Lingkungan Kebijakan, akan dipilih informan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap implementasi *e-Government* (Inpres no 3 tahun 2003) sebagai Informan. Mengingat luasnya lingkup informan pelaksana dan masyarakat yang berkepentingan maka digunakan teknik *Snow balling* yaitu pemilihan informan dengan sengaja untuk memperoleh “Key informan” yaitu orang yang mengetahui dengan benar tentang *e-Government* di Kabupaten Majalengka.

6. Sumber Data : 1. Data Primer (Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari para informan khususnya aparat staf telematika Kantor Informasi dan Telematika Kabupaten majalengka.). 2. Data Sekunder (Beberapa data

sekunder yang terkait dengan kebijakan implementasi *e-Government* diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, artikel-artikel, serta bentuk-bentuk lain yang dapat memberikan informasi dalam kaitannya penelitian implementasi kebijakan ini).

7. **Metode Pengumpulan Data** : 1. Studi Pustaka, 2. Wawancara Mendalam, 3. Dokumentasi, 4. Pengamatan langsung.
8. **Instrumen Penelitian** : Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.
9. **Metode analisis data** : Metode analisis data yang akan digunakan adalah metode analisis induktif

Data atau informasi yang diperoleh akan dianalisis melalui Tahapan-tahapan sebagai berikut : Matthew dan michael, (Dalam Hamid Patilima, 2005:98).

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
IMPLEMENTASI INPRES NO 3 TAHUN 2003
DI KABUPATEN MAJALENGKA

A. Hasil Penelitian

1. Indikator Karakteristik Kebijakan

Untuk mengetahui gambaran 'Karakteristik Kebijakan' maka dilakukan wawancara dengan Informan. Informan yang dipilih adalah Mantan Kepala Kantor Informasi dan Telematika Bapak H.Abdul Gani sebagai Informan 1 dan Staf seksi Telematika Bidang Informasi dan Telematika Dinas Perhubungan Bapak Helmi sebagai Informan 2. Informan 1 merupakan subjek langsung yang Bertanggung jawab menyelenggarakan proyek *e-Government* di Kabupaten Majalengka sedangkan Informan 2 sangat berperan dalam penyelenggaraan berbagai urusan teknis pembangunan proyek *e-Government* di kabupaten Majalengka sampai saat ini. Oleh Karena alasan tersebut kedua Informan yang dipilih dapat merepresentasikan gambaran indikator 'Karakteristik Kebijakan' Inpres no 3 tahun 2003 (tentang strategi pengembangan nasional pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka).

a. Fenomena kejelasan isi kebijakan Inpres no 3 tahun 2003.

Kesimpulan untuk fenomena ini bahwa Inpres no 3 tahun 2003 kurang diperhatikan dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka.

b. Fenomena Dukungan Teoritis terhadap Implementasi Inpres no 3 tahun 2003.

Kesimpulan point ini adalah bahwa Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 didukung dengan kajian teoritis.

c. Fenomena Alokasi Sumber Daya Finansial terhadap kebijakan Implementasi Inpres no 3 tahun 2003

Sesuai dengan pendapat informan 1 disimpulkan ialah masih lemahnya masalah pendanaan bagi pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka.

d. Fenomena Dukungan antar berbagai Institusi Pelaksana.

Kesimpulan yang bisa diambil dari fenomena ini yaitu ketiadaan dukungan berbagai institusi pelaksana dalam hal ini SKPD (Satuan kerja Perangkat daerah) di luar Kantor Informasi dan Telematika.

e. Fenomena Kejelasan dan Konsistensi Aturan yang ada pada Badan Pelaksana.

Bisa disimpulkan bahwa masih adanya ketidakkonsistenan dalam menerapkan aturan terkait dengan Implementasi Inpres no 3 tahun 2003.

f. Fenomena Komitmen Aparat terhadap Tujuan Kebijakan atau Disposisi implementor.

Disimpulkan dari hal tersebut menunjukkan bahwa implementor dalam hal ini Kantor Informasi dan Telematika memiliki komitmen yang kuat bagi pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka.

g. Fenomena Akses Kelompok Luar yang diberikan Implementor kepada kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam Implementasi Kebijakan Inpres no 3 tahun 2003.

Disimpulkan bahwa Implementor memberikan akses bagi kelompok luar untuk berpartisipasi dalam Pengembangan *e-Government* dikabupaten Majalengka.

2. Indikator Lingkungan Kebijakan

Namun pada suatu kesempatan Informan 1 menyatakan bahwa *“Di dalam pendidikan sebuah proses yang cepat”*. Pernyataan ini menunjukkan bahwa golongan akademisi memiliki tingkat adaptasi yang paling baik termasuk penerimaan terhadap perkembangan berbagai teknologi informasi. Atas dasar itulah maka untuk membantu dalam menggambarkan ‘Indikator Lingkungan’ maka dipilih Informan 3, 4, dan 5 yang berasal dari dunia pendidikan. Adapun informan 3 bernama Budiana Setiawan yang merupakan seorang tenaga pengajar yang bekerja di sebuah sekolah menengah tingkat pertama. Sedangkan Informan 4 bernama Gilang Dwi Ramadhan seorang siswa SMAN 1 Majalengka dan Informan 5 yang bernama Dewi Nurliantika, seorang mahasiswi jurusan akuntansi UNMA (Universitas Majalengka).

a. Fenomena kondisi sosial, ekonomi dan tingkat penguasaan teknologi yang berkepentingan yang ada di Kabupaten Majalengka.

Disimpulkan dalam hal ini kondisi sosial, ekonomi dan tingkat penguasaan teknologi Masyarakat Majalengka dapat dikatakan tidak

menjadi hambatan bagi Pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka.

b. Fenomena Dukungan Publik / Masyarakat yang berkepentingan di Kabupaten Majalengka.

Disimpulkan bahwa Masyarakat Majalengka mendukung terhadap keberadaan *e-Government* di Kabupaten Majalengka khususnya bagi penciptaan transparansi publik.

3. Indikator Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka.

a. Fenomena Pembentukan Jaringan Informasi dan Transaksi Pelayanan Publik

Disimpulkan bahwa Salah satu tujuan implementasi Inpres no 3 tahun 2003 yaitu pembentukan jaringan informasi melalui pengembangan *e-Government* khusus di Kabupaten Majalengka sudah mencapai tahap tertentu namun belum melangkah pada Bentuk pelayanan yang memungkinkan berbasis Transaktif (Pelayanan *e-Government* yang memungkinkan perpindahan uang dari penerima pelayanan ke pemberi pelayanan).

b. Fenomena Pembentukan Hubungan Interaktif dengan Dunia Usaha.

Disimpulkan bahwa Tujuan Pembentukan Hubungan Interaktif belum tercapai sebagaimana yang tercantum dalam Inpres No 3 tahun 2003.

c. Fenomena Pembentukan Mekanisme dan Saluran Komunikasi dengan Lembaga-lembaga Daerah serta penyediaan Fasilitas

Publik bagi Masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam Perumusan Kebijakan Daerah.

Disimpulkan bahwa Implementasi *e-Government* di Kabupaten Majalengka belum mewujudkan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga daerah secara menyeluruh namun sudah memiliki fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan daerah.

d. Fenomena Pembentukan Sistem Manajemen dan Proses Kerja yang Transparan dan Efisien serta memperlancar Transaksi dan Layanan antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Disimpulkan bahwa Pengembangan *e-Government* belum menjamin terwujudnya sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien terlebih lagi menjamin kelancaran transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

B. Pencapaian Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka.

Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka telah berjalan hingga saat ini. Keberadaan *website* Majalengkakab.go.id menjadi klaim bagi daerah Kabupaten Majalengka telah mengimplementasikan Inpres no 3 tahun 2003. Namun Berdasarkan temuan penelitian sub indikator Pencapaian Tujuan Inpres no 3 tahun 2003 menunjukkan bahwa sebenarnya proses Implementasi di Kabupaten majalengka belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa Implementasi Inpres No 3 tahun 2003 yang merupakan landasan pembangunan *e-Government* akan menimbulkan dampak atau perubahan-perubahan yang

diinginkan secara sempurna. Ada saja sisi-sisi lain yang memerlukan usaha yang lebih keras untuk mencapainya. Adapun Gejala ini diistilahkan dengan *implementation gap*.

C. Fenomena-fenomena *Implementation gap*.

Terhambatnya pembangunan sistem informasi dan infrastruktur jaringan komputer merupakan dua gejala yang menunjukkan lemahnya semangat gotong royong dalam antara Kantor Informasi dan Telematika dengan SKPD lain. Dukungan berbagai SKPD di lingkungan Kabupaten Majalengka sangat dibutuhkan tidak saja dalam retorika tetapi juga dalam hal pembagian beban sumber daya. Dengan melihat kondisi seperti ini maka beban pengembangan *e-Government* ditanggung sepenuhnya oleh Kantor Informasi dan Telematika, tak heran jika Kantor Informasi dan Telematika merasa kehabisan energi dalam mewujudkan *Blue Print e-Government* tersebut khususnya mengenai sumber daya anggaran dan SDM.

Kemudian jika mencermati dokumen *Blue print e-Government* yang ada di Kabupaten Majalengka tersebut sama sekali tidak menyinggung Inpres No 3 tahun 2003. Padahal sebagai landasan strategi pengembangan *e-Government* secara nasional hendaknya pembangunan jaringan Informasi dan Infrastruktur jaringan komputer didasarkan pada pertimbangan Inpres No 3 tahun 2003. Disini pemerintah lebih menitikberatkan pada UU no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah sehingga dalam pengembangan *e-Government* terserah pada kondisi daerah yang bersangkutan. Dalam Sub Karakteristik Kebijakan fenomena Kejelasan isi Kebijakan inpres no 3 tahun 2003 terlihat bahwa Implementor kurang memperhatikan keberadaan inpres no 3 tahun 2003 sehingga *Road Map/*

Blue print rancang bangun teknologi informasi yang menjadi landasan pengembangan *e-Government* tidak diproyeksikan terhadap pencapaian tujuan ideal Inpres no 3 tahun 2003 tersebut. Sehingga pada akhirnya apa yang ada dalam pikiran pemerintah Kabupaten Majalengka tentang Inpres no 3 tahun 2003 hanyalah sebatas Fenomena pendorong *e-Government*.

Disamping itu berdasarkan berbagai fenomena yang ada dalam Karakteristik Kebijakan terdapat benang merah antara fenomena kejelasan isi kebijakan inpres no 3 tahun 2003 dengan fenomena disposisi implementor. Disposisi implementor adalah watak dari karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis, Sehingga dalam hal ini Komitmen Implementor yakni aparatur Kantor Informasi dan Telematika bagi pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka terfokus pada *road map/ blue print e-Government* bukan pada Inpres no 3 tahun 2003.

Disisi yang lain keberadaan menu forum yang pada hakikatnya merupakan aplikasi *chatroom* disertakan dalam portal *website* majalengka.go.id namun keberadaannya bukan sekedar untuk menarik pengunjung / pengguna tetapi lebih didasarkan pada alasan penyerapan aspirasi masyarakat melalui dialog publik atau hubungan dialogis antara pemerintah dan masyarakat dalam menu forum tersebut.

Namun sedikit sekali perhatian masyarakat terhadap portal *website* pemerintah Kabupaten Majalengka tersebut. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui keberadaan *website* resmi majalengkakab.go.id Kabupaten Majalengka sehingga keberadaan menu forum masih memerlukan publikasi / sosialisasi sebelum menjadi media yang berperan dalam mengartikulasikan aspirasi daerah. Seperti

yang terjadi pada Informan 3 yang sama sekali tidak mengetahui bahwa pemerintah daerahnya telah memiliki *website* majalengkakab.go.id di dunia maya.

Berbagai Inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya Implementasi konsep tersebut. Keuntungan atau manfaat tentunya harus dirasakan oleh pihak masyarakat majalengka secara umum bukan oleh pihak pemerintah, karena masyarakat majalengkalah yang menerima pelayanan. Semakin tinggi kemanfaatan yang dirasakan masyarakat maka semakin baik pula nilai sebuah sistem *e-Government*. Jika melihat kondisi kenyataan di lapangan tanpa dukungan publikasi / sosialisasi sulit bagi sistem *e-Government* yang ada di Kabupaten Majalengka untuk menunjukkan kemanfaatannya bagi masyarakat. Walaupun sebenarnya *website* majalengkakab.go.id bisa ditemukan dengan bantuan mesin pencari seperti Google, yahoo, dll sebagaimana yang dilakukan informan 4 namun tetap sulit untuk meyakinkan masyarakat agar memanfaatkan kemampuan sistem tersebut. Hal ini dikarenakan peranan sosialisasi tidak saja memberitahukan tetapi juga sebagai media promosi yang menarik masyarakat untuk menggunakan sistem tersebut.

Oleh karena itu kondisi sosial dan ekonomi dan penguasaan teknologi bukanlah ukuran hambatan bagi keberhasilan sebuah kebijakan *e-Government* di daerah karena pada dasarnya kondisi mayoritas daerah yang ada di Indonesia cenderung memiliki karakteristik yang sama, termasuk Kabupaten Sragen yang merupakan daerah pertanian terbukti tetap mampu mendorong warganya untuk menggunakan sistem *e-Government*, bahkan *one stop service* Kabupaten Sragen menjadi primadona tidak terlepas dari promosi mereka di berbagai media.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Temuan penelitian dan Pembahasan tentang Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Implementasi Inpres no 3 tahun 2003 di Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan baik.
2. Penyebab belum berhasilnya implementasi Inpres no 3 tahun 2003 disebabkan oleh tiga fenomena yaitu :
 - Ketidapahaman Implementor akan Inpres no 3 tahun 2003,
 - Sikap implementor yang tidak komitmen dengan Inpres no 3 tahun 2003.
 - Publikasi/sosialisasi yang kurang.

B. Saran

Agar Implementasi lebih optimal maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dibangun sebuah komitmen bagi Pemerintah Majalengka untuk menjadikan Inpres no 3 tahun 2003 sebagai dasar dalam pengembangan *e-Government* di Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengatasi masalah sosialisasi yang masih minim hendaknya dilakukan promosi lewat taktik *push* and *pull*